



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2024**



Jln. El Tari No. 1 Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0389) 213564 **Email : dinaskominfo@belukab.go.id**

ATAMBUA

2024

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu, disusun sebagai tindak lanjut Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Deputy Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/6/AA.05/2025 Tanggal 07 Januari 2025 Perihal Desk tentang Penerapan Sistem Kerja dan Pelaporan AKP 2024.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini akan dilaporkan pelaksanaan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu untuk Tahun 2024 yang termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 yang menguraikan tentang Rencana Kinerja, Kegiatan Tahunan, Pengukuran Kinerja serta Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2024.

Banyak hal yang disampaikan dalam Laporan ini terutama kegiatan pokok sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam laporan ini disajikan uraian tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pencapaian Kinerja di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Atambua, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BELU,



FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19760928 200112 1 005

IKTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab perlu adanya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud untuk mengetahui kemampuan dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Untuk itu kami telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang dapat bermanfaat bagi Evaluasi Kinerja dan Perencanaan Kegiatan yang berkelanjutan.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah : ***“Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Aman di Kabupaten Belu”.***

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dirumuskan sejumlah misi yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM serta Sarana dan Prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka Peningkatan Literasi dan Profesionalisme.
2. Mengupayakan terselenggaranya sinergitas pengelolaan dan pengembangan *e-government* melalui Sistem Pemerintahan Yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi di Kabupaten Belu.
3. Mengupayakan Peningkatan dan Pemberdayaan KIM, tatap muka (interpersonal) serta Layanan Media Luar Ruangan Bagi Terselenggaranya Pelayanan Publik kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.
4. Mendorong Peran Masyarakat Pengguna Jaringan Internet dalam rangka ***“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi”.*** beretika dan bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
5. Mendorong Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Komunikasi Persandian dan Statistik Sektoral yang cepat dan aman bagi pemerintah dan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan misi tersebut diatas, telah dilakukan berbagai Program dan Kegiatan serta evaluasi tentang Program dan Kegiatan untuk menilai apakah usulan yang telah dilakukan berhasil atau tidak dalam mencapai Misi, yang sekaligus mewujudkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu pada Tahun Anggaran 2024.

Atambua, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BELU,



FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19760928 200112 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL..	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
LAMPIRAN LKIP.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	8
1.1. Struktur Organisasi.....	8
1.2. Fungsi dan Tugas	20
1.3. Keadaan Pegawai.....	21
1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	23
1.5. Keuangan.....	28
1.6. Sistematisasi LKIP.....	29
1.7. Isu-Isu Strategis.....	31
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis.....	39
2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	39
2.1.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	40
2.2. Perjanjian Kinerja.....	42
2.3. Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran.....	42
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	43
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	50
3.3. Realisasi Anggaran.....	64
 BAB IV P E N U T U P	
4.1. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Organisasi.....	70
4.2. Langkah untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi.....	70

Lampiran – LKIP :

- 1). Rencana Kerja (Renja).
- 2). Perjanjian Kinerja (PK).
- 3). Rencana Aksi yang mencantumkan target secara periodik dan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- 4). Ukuran kinerja tingkat Eselon III dan IV sebagai turunan atasannya.
- 5). Lain-Lain yang dianggap perlu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu, disusun sebagai tindak lanjut Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Deputi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/6/AA.05/2025 Tanggal 07 Januari 2025 Perihal Desk tentang Penerapan Sistem Kerja dan Pelaporan AKIP 2024.

Sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah pembantu Kepala Daerah dalam Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi Layanan Informasi Publik, Infrastruktur dan Teknologi, Hubungan Media serta Persandian dan Statistik dalam penyampaian informasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik, cetak dan tatap muka.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Belu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, maka peranan Dinas Komunikasi Dan Informatika sangat penting dan strategis sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta melancarkan kegiatan pembangunan di semua sektor, sehingga sistem informasi harus ditata dan disempurnakan dengan diimbangi sumber daya manusia yang handal, trampil, tangguh dan tanggap dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Di mana Kabupaten Belu memiliki peranan penting dan strategis dalam berbagai aspek kehidupan dalam kapasitasnya sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

Perkembangan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika telah berlangsung dan menghasilkan capaian – capaian bermakna, bahkan hingga saat ini pun terus bergerak maju dan tidak pernah berhenti berdinamika untuk terus meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan pembangunan di daerah ini.

Namun demikian harus diakui pula bahwa capaian keberhasilan yang diperoleh dalam Bidang Komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Persandian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara serius dan komprehensif, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu juga mengantisipasi dinamika perubahan yang mengglobal dalam bidang telekomunikasi bekerja sama dengan *Stakeholder*, para pemangku kepentingan di daerah, perguruan tinggi, PT. Telkom, Operator Seluler Dalam Negeri, Layanan Pos Universal, Kelompok Informasi Masyarakat.

Pelaku Usaha dan UKM serta Industri di Bidang IT akan membawa kemajuan TIK yang cepat, aman dan terintegrasi di Kabupaten Belu sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste akan semakin maju, oleh karena itu dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah di Bidang TIK, persandian dan statistik, maka hal ini merupakan peluang yang harus dikembangkan di masa mendatang.

Oleh karena itu demi terwujudnya tujuan akhir dari Dinas Komunikasi Dan Informatika yaitu mewujudkan suatu keadaan yang tertib, lancar, aman melalui penyebaran informasi dan pelayanan publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat, aman, dan terintegrasi di Kabupaten Belu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan LKIP untuk menjelaskan program – program dan kegiatan instansi yang dilaksanakan selama setahun baik yang dibiayai dari pos anggaran rutin, maupun yang dibiayai dari pos anggaran pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna tercapainya pemerintahan yang baik dan berkesinambungan (*Good Governance*).
2. Tujuan penyusunan Dokumen LKIP adalah untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan kinerja dari suatu Instansi selama setahun maupun tingkat kegagalannya yang merupakan tolok ukur dan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas : 1 orang (1 terisi)
- b. Sekretaris : 1 orang (1 terisi)
- c. Kepala Bidang : 4 orang (4 terisi)
- d. Kepala Sub Bagian : 1 orang (1 terisi)
- e. Jabatan Fungsional : 12 orang (7 lowong)

Struktur terlampir.

Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Belu keberadaannya berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, dengan jabaran sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Substansi Program, Data, Evaluasi dan Keuangan
3. Bidang Layanan Informasi Publik, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - c. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
4. Bidang Infrastruktur dan Teknologi, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Sub Koordinator Substansi Pembangunan Aplikasi;
 - c. Sub Koordinator Substansi Keamanan Informasi E-Government;
5. Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Substansi Layanan Hubungan Media;
 - b. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik;
 - c. Sub Koordinator Substansi Tata Kelola E-Government;
6. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
 - a. Sub Koordinasi Substansi Persandian dan;
 - b. Sub Koordinasi Substansi Statistik;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Administrasi dengan Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Pelaksanaan yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan Unit Organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional tertentu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi Layanan Informasi Publik, Infrastruktur dan Teknologi, Hubungan Media dan Sumber Daya serta Persandian dan Statistik dalam penyampaian informasi baik langsung maupun tidak langsung (melalui media) dengan arah dan sasaran yang akan dicapai antara lain :

*Pertama : “**Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi Menuju Good Governance**”.*

Dengan peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dapat dilakukan dengan :

- a) Mewujudkan kebebasan persaing bertanggungjawab dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan secara cerdas dan demokratis;
- b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa lokal yang independen;
- c) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas;
- d) Menciptakan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di Daerah Perbatasan Wilayah Kabupaten Belu untuk memudahkan proses sosialisasi dan trasparansi kebijakan;

*Kedua : “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional/ Berkompetensi dan Berbasis Teknologi Informasi**”.*

- a) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah;

- b) Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk pemerataan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi serta menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek;
- c) Meningkatkan peran media massa dan media online yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif;
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengakses dan mengembangkan media telekomunikasi dan informasi layanan publik;
- e) Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai rumusan tugas dan uraian tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Dalam rumusan tugasnya sebagai berikut : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Sekertaris

Dalam rumusan tugasnya sebagai berikut : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkup dinas meliputi perencanaan, keuangan dan bidang umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, lancer dan akurat.

a. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Mempunyai rumusan tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menghimpun dan mengolah data pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup dinas berdasarkan rencana kerja pokja area perubahan reformasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan daftar urut kepangkatan, pengusulan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan dan Taspen agar tersedia data usulan yang valid;
5. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
6. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usulan pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan sasaran kerja pegawai agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
7. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
8. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;

10. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip vital dan pengelolaan arsip inaktif, sepuluh tahun ke bawah agar terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang baik;
11. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;
12. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
14. Memberikan layanan humas kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
16. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau Lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Membimbing bawahan dalam melaksanakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal, professional, beretika dan bermoral, dan;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Kepala Bidang Layanan Informasi Publik

Memiliki rumusan kerja sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang layanan informasi publik meliputi kegiatan seksi pengelolaan opini publik, seksi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta kegiatan seksi pengelolaan media komunikasi publik dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan handal.

D. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Teknologi

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan teknologi meliputi kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi, seksi pengembangan aplikasi. serta kegiatan seksi keamanan informasi *e-goverment* dan kegiatan bimbingan teknologi, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan handal.

E. Kepala Bidang Hubungan Media Dan Sumber Daya

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media dan sumber daya meliputi kegiatan seksi hubungan media, seksi pengelolaan sumber daya dan layanan public serta kegiatan seksi tata kelola *elektronik goverment* dan kegiatan bimbingan teknologi, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan handal.

F. Kepala Bidang Persandian dan Statistik

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik meliputi kegiatan seksi persandian dan kegiatan seksi statistik, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan handal.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL

A. Sub Koordinator Substansi Program, Data, Evaluasi Dan Keuangan

1. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya proragm dan kegiatan yang akomodatif;
2. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-masing unit kerja di lingkungan dinas agar tersedia database dan statistik dinas sesuai kebutuhan;
3. Menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
4. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
5. Merencanakan kegiatan keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
7. Memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk gaji pegawai negeri sipil dan tunjangan lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
8. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
9. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi dan koordinasi dengan intansi dan pihak terkait;
10. Melakukan pencatatan aset sesuai pembelanjaan dinas untuk penyusunan laporan neraca dinas.

B. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Opini Publik

Memiliki rumusan kerja sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang layanan informasi publik melalui kegiatan seksi pengelolaan opini publik, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

C. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Memiliki rumusan kerja sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang layanan informasi publik melalui kegiatan seksi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

D. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Memiliki rumusan kerja sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang layanan informasi publik melalui kegiatan seksi pengelolaan media komunikasi publik dan kegiatan bimbingan teknologi, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

E. Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Teknologi

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan teknologi melalui kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

F. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan *elektronik goverment* meliputi kegiatan seksi pengembangan aplikasi dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan, seksi yang maksimal dan handal.

G. Sub Koordinator Substansi Keamanan Informasi

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan teknologi meliputi kegiatan seksi keamanan informasi dan kegiatan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

H. Sub Koordinator Substansi Layanan Hubungan Media

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media dan sumber daya melalui kegiatan seksi hubungan media dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

I. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Sumber Daya Dan Layanan Publik.

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media dan sumber daya melalui kegiatan seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik. serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

J. Sub Koordinasi Substansi Tata Kelola E-Government

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan media dan sumber daya melalui kegiatan seksi tata kelola *e-government*. serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal.

K. Sub Koordinasi Substansi Persandian

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik melalui kegiatan seksi persandian dan kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal;

L. Sub Koordinasi Substansi Statistik

Memiliki rumusan tugas sebagai berikut : Memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik meliputi kegiatan seksi statistik dan kegiatan bimbingan teknologi, supervisi, pemantauan, pelaporan, evaluasi, serta pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan seksi yang maksimal dan handal;

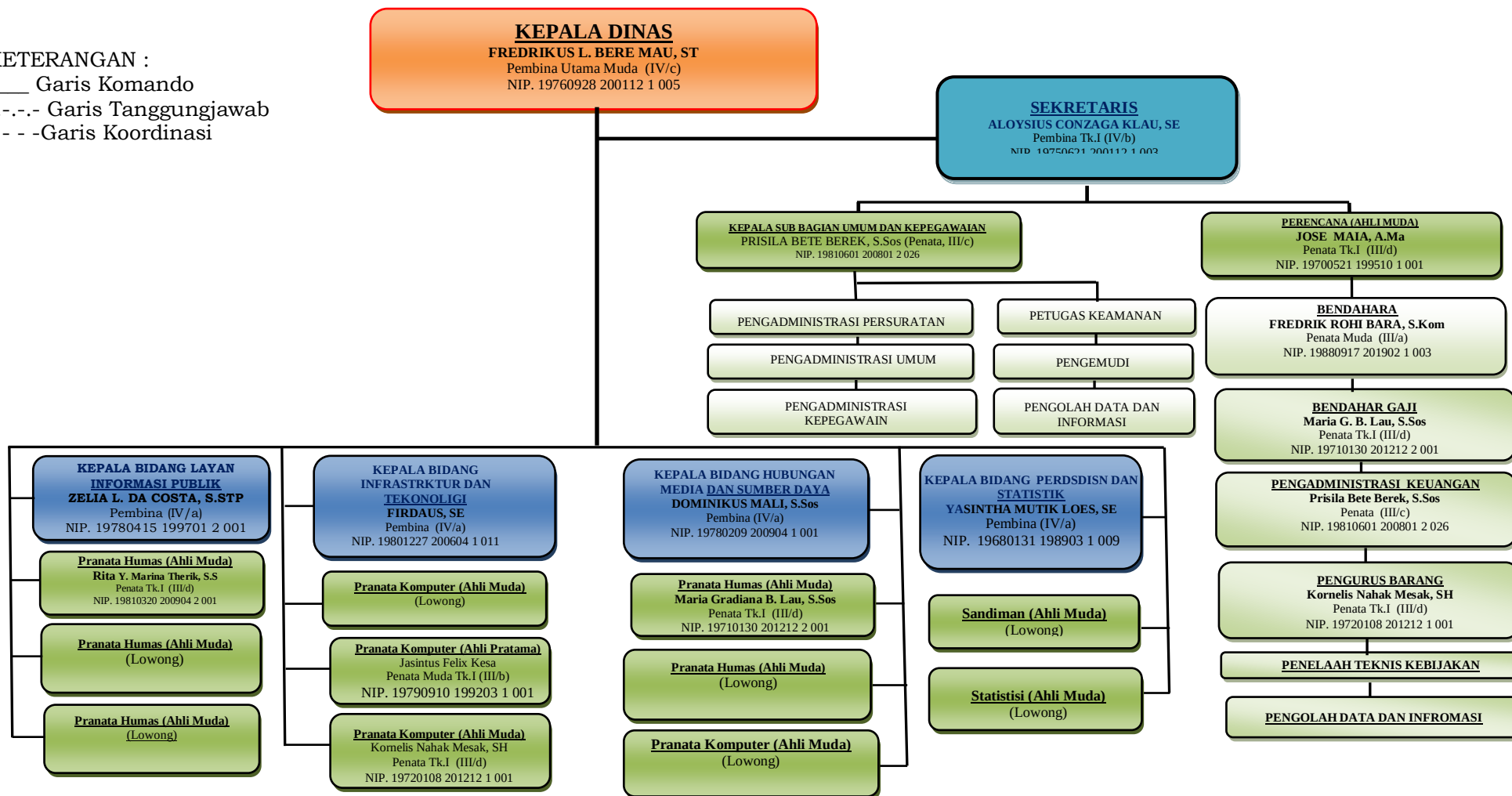
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU

KETERANGAN :

— Garis Komando

-.-.- Garis Tanggungjawab

--- Garis Koordinasi



1.2. FUNGSI DAN TUGAS

a. Fungsi

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi Layanan Informasi Publik, Infrastruktur dan Teknologi, Hubungan Media serta Persandian dan Statistik yang tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi dan Informatika.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.
4. Penyelenggaraan inventarisasi penyediaan bahan data dan informasi.
5. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan.
6. Pelaksanaan penyediaan bahan pemantauan dan pengendalian.
7. Penyusunan penyediaan bahan evaluasi dan pelaporan.
8. Penyiapan rencana dan program penyelenggaraan manajemen pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
9. Penyiapan pemberian berijin, pembangunan menara telekomunikasi bersifat khusus.
10. Pelaksanaan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana telekomunikasi.
11. Pembinaan kegiatan penyediaan dan pengawasan media elektronik.
12. Pengolahan urusan ketatausahaan Dinas.
13. Melakukan peliputan kegiatan pemerintahan, menyusun berita daerah, mengedit dan menyiarkan melalui *Website* Kabupaten Belu belukab.go.id.

b. Tugas

Tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai.

1.3. KEADAAN PEGAWAI

Sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu secara internal antara lain :

Salah satu unsur terpenting keberhasilan pelayanan publik dan harus menjadi prioritas adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Berikut ini profil sumber daya manusia sebagai faktor kekuatan di dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kekuatan SDM tersebut, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel : 1.3.1

**STRUKTUR KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BELU TAHUN 2024**

No	Jabatan/Eselonoring	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala /II b	1 orang	Terisi
2.	Sekretaris/III a	1 orang	Terisi
3.	Kepala Bidang/ III b	4 orang	Terisi
4.	Jabatan Fungsional /IV a	5 orang	(7 orang lowong)
5.	Kepala Sub Bagian/IV a	1 orang	Terisi)
6.	Jabatan Pelaksana/Non Eselon PNS	3 orang	-
7.	Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS	3 orang	2 orang Tenaga Kebersihan dan 1 orang Tenaga Keamanan
	Jumlah	18 orang	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kominfo. T.A. 2024

Kondisi kepegawaian baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawaian Honorer/Tidak Tetap pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel : 1.3.2

**JUMLAH PERSONIL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU TAHUN 2024**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Personil/Pegawai (Orang)		Total	Prosentase (%)
		Laki - Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Strata 2 (S2)	-	-	-	-
2	Strata 1 (S1)	6	5	11	33,33
3	Akademik / D3	2	-	2	6,06
4	SLTA	2	-	2	6,06
5	SLTP	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-
	Jumlah	10	5	15	45,45

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kominfo. TA. 2024

Tabel : 1.3.3

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT GOLONGAN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU TAHUN 2024**

No.	Tingkat Golongan ASN	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Golongan IV/c	1
2	Golongan IV/b	1
3	Golongan IV/a	4
4	Golongan III/d	4
5	Golongan III/c	1
6	Golongan III/b	2
7	Golongan III/a	1
8	Golongan II/d	1
9	Golongan II/c	-
10	Golongan II/b	-
11	Golongan II/a	-
12	Golongan I/a	-
13	Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS	3
	Jumlah	18

Sumber Data : Pegawai Dinas Kominfo. Kab. Belu Tahun 2024

1.4. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran tugas – tugas, maka sebagai gambaran bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu setelah menjadi OPD baru memiliki inventaris berupa aset kendaraan bermotor, bangunan dan tanah, inventaris ruangan, alat rumah tangga maupun alat studio dan komunikasi. Aset-aset tersebut diperoleh dari aset ketika masih bergabung dengan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Belu. Aset Hibah Bantuan Pemerintah Pusat, Aset Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, maupun Aset Pengadaan Tahun 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut di bawah ini :

TABEL : 1.4.1
DATA INVENTARIS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No Urut	Nama / Jenis Barang		Volume/ Satuan	Model/ Tipe	Tahun perolehan	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7
	No.Polisi No. Rangka / No. Mesin					
1	DAIHATSI (TERIOS)	DH 1071 WF MHKG2CJ1BKD-15128- DCE3771	1 unit	Daihatsu (Terios)	2011	Baik
2	Isuzu	DH B 9141 PQV MHCTBR54CEKU01589 H0017221	1 unit	SL-I FLAT DECK	2014	Baik
3	Iszu	DH B 9141 PQV	1 unit	M-Pustika	2014	Baik
	Sub Total		3 unit			
	No.Polisi No. Rangka / No. Mesin					
1	Sepeda Motor	DH 550 EF/2160 YG MH1UABE105K113335 UABEE – 1112817	1 unit	GL Max II	2005	Baik
2	Sepeda Motor	DH 565 AE / 2665 YG MH8FD125R7J193639 F404-ID-193516	1 unit	Shogun	2007	Baik
3	SepeSda Motor	DH 439 CE / 2233 YH MH8EN125A-7J386733 F405-ID-386588	1 unit	Thunder	2007	Baik
4	SeSpeda Motor	DH 445 CE/2260 YG MH8EN125A7J-400365 405-ID-400237	1 unit	Thunder	2007	Baik
5	Sepeda Motor	DH 446 CE/2234 YH MH8EN125 A7J-387073 F405-ID-386019	1 unit	Thunder	2007	Baik
6	Sepeda Motor	DH 552 BE / 2618 YG MH8FD110X13-569942 E109-ID-571702	1 unit	Shogun	2007	Baik
7	SeSpeda Motor	DH 440 CE / 2229 YH MH8EN125A-7J393919 F405ID394145	1 unit	Thunder	2007	Baik

8	SeSpeda Motor	DH 2639WF MH8EN125A-7J393919 – G3E7E0349000	1 unit	Yamaha/Vixion	2017	Baik
9	Sepeda Motor	DH 2640 WF MH3RG1810HK-365307 – G3E7E0367408	1 unit	Yamaha/Vixion	2017	Baik
10	Sepeda Motor	DH 5194WF MH35E8890H322 – 09944 – E3R2E1512872	1 unit	Yamaha/Mio Z	2017	Baik
11	SepSeda Motor	DH 2522 WF MH31PA004EK644243-1PA644516	1 unit	Yamaha/Vicxon	2014	Baik
12	Sepeda Motor	DH 2385 WR MH3CE88HCKJ071132-E3R2E2357742	1 unit	Yamaha/New Mio Blue Core	2019	Baik
Sub Total			15 unit			

Sumber : Data Rekon Aset Dinas Komunikasi dan Informatika T.A. 2024

TABEL : 1.4.2
DAFTAR SENSUS INVENTARIS BARANG TAHUN 2024

No.	Nama Ruang	Nama Barang	Banyaknya	Tahun Pembuatan	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6
1	Ruangan Kadis	- Meja Biro/Meja Kaca	1		
		- Meja 1/2 Biro	1		
		- Kursi Roda	1		
		- Kursi Sofa + Meja Kaca	1		
		- Kursi Plastik Putih	4		
		- Kursi Rangka Besi	2		
		- Kotak Sampah	1		
		- Asbak Rokok	2		
		- Kota Tissue	2		
		- Pot Bunga	1		
		- Kamoceng	1		
		- Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2		
		- Gambar Burung Garuda	1		
		- Papan Pengumuman/White Board	1		
		- Penghapus Papan/White Board	1		
		- Kain Horden Warna Hijau	1		
		- Kain Horden Warna Putih	1		
		- Lap Top	2		
2	Ruang Sekretaris	- Meja Biro	1		
		- Meja 1/2 Biro	1		
		- Kursi Roda	1		
		- Kursi Plastik	2		
		- PC Komputer/Lengkap	1		
		- Kain Horden Warna Hijau	1		
		- Kotak Tissue	1		
		- Kotak File	1		
		- Kotak Sampah	1		

3	Ruang Kasubag. Umum	- Meja Biro	2		
	dan Kepegawaian	- Meja 1/2 Biro	1		
		- PC Komputer/Lengkap	1		
		- Kotak File	1		
		- Televisi 2" Inci	1		
		- Lemari kayu 2 Pintu	1		
		- Sapu Lidi	2		
		- Sapu Ijuk	3		
		- Sapu Pel Lantai	1		
		- Sekop Sampah	1		
		- Ember Plastik	1		
		- Papan Pengumuman/White Board	1		
		- Penghapus Papan/White	1		
		- Dispenser + Galon Air	2		
		- Minum	2		
		- Mesin Absensi/Finger Print	1		
4	Ruang Kepala Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya	- Meja 1/2 Biro	6		
		- Rak Piring/Gelas	1		
		- Pc Komputer/Media Centre	7		
		- Wuaifi/LAN	1		
		- Meja Komputer	6		
		- Kursi Plastik	6		
		- Stafol/UPS	6		
		- Kursi Kayu	4		
		- Kain Horden Warna Hijau	2		
		- Weker / Jam Dinding	1		
5	Ruang Kepala Bidang Layanan Informasi Publik	- Meja Biro	5		
		- Meja 1/2 Biro	2		
		- Kursi Plastik	8		
		- Kursi Kayu	2		
		- Pc Komputer/Lengkap	5		
		- Lap Top	1		
		- Papan Pengumuman/White Board	1		
		- Penghapus Papan/White Board	1		
		- Kain Horden Warna Hijau	2		
		- Lis Papan Pameran Foto	5		
		- Kamera Digital	1		
5.	Ruang Kepala Bidang	- Meja Biro	1		
	Persandian dan Statistik	Meja 1/2 Biro	4		
		- Meja Komputer	1		

		- Kursi Roda	7		
		- Pc Komputer/Lengkap	2		
		- Lap Top	1		
		- Stovol/UPS	1		
		- Kursi Plastik	1		
		- Printer Epson	1		
		- Radio SSB/Lengkap	1		
6	Ruang Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi	- Meja Biro	1		
		- Meja 1/2 Biro	4		
		- Meja Komputer	2		
		- Kursi Kayu	3		
		- Kursi Roda	1		
		- Kursi Plastik Putih	5		
		- Meja Mixer	1		
		- Pc Komputer/Lengkap	4		
		- Wuaifi/Astinet	1		
		- Lap Top	1		
		- Lemari Besi	2		
		- Kamera Digital/Canon	2		
		- Tripot	2		
		- Ember Sampah	2		
		- Kain Horden Warna Hijau	2		
		- Kotak File	1		
		- Asbak Rokok	1		
		- Printer Canon	1		
		- Komoceng	1		
		a. Amplifier/Lengkap :			
		- Power 2000 Watt (Rhoad)	1		
		- Power EP 2200 Watt (Rhoad)	1		
		b. Equalizer :			
		- Equalizer DC 231	1		
		- Mixer 12 Chanel EFX 12	1		
		c. Loudspeaker :			
		Speaker Pasif SY 215 (Rhoad)	2		
		- Speaker SW 118/Aktif	2		
		Kabel Speaker 100 Meter	1		
		d. Sound System :			
		- Monitor KBX 100 (Rhoad)	1		
		- Monitor GC 112 (Rhoad)	1		
		- Monitor BC 112 (Rhoad)	1		
7	Perencanaan, Keuangan	- Meja 1/2 Biro	3		
	dan Pelaporan	- Kursi Kayu	4		

		- Kursi Plastik	3		
		Lemari Bufet/Besi 4 Susun	1		
		- Lemari Triples 2 Pintu	1		
		Dispenser + Galon Air Minum	3		
		- Rak Piring/Gelas	1		
		- Ember Sampah	5		
		- Asbak Rokok	2		
		- Pc Komputer/Lengkap	2		
		- Printer Canon	1		
		- Lap Top	3		
		- Sapu Lidi	2		
		- Sapu Ijuk	3		
		- Sapu Pel Lantai	1		
		- Sekop Sampah	2		
		- Komoceng	2		
		- Sikat WC	2		
		- Gayung Air/Kotak Tissue	2		
1	Dari Bagian Aset	- Meja Biro	1 unit		
		- Kursi Kayu	4 buah		
		- Kursi Plastik	15 buah		
2	Dari Perhubungan	- Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	2014	-
		Roda 4 (KM-Pustika)			
		Kendaraan Dinas/Operasional 2	7 Unit	2005-2007	88.100.000
		- Pc Komputer	10 Unit	2016	104.831.000
		- Lap Top	4 Unit	2016	29.990.000
		- Hardisk	2 Unit	2016	1.500.000
		- Camera + Attachment	1 Unit	2016	15.779.000
		- Hardisk	2 Unit	2016	1.300.000
		- Peralatan Komputer			2.800.000
		- Alat Studio dan Komunikasi			304.862.000
		- Meubelair			4.042.300
		Peralatan Studio & Kom Komunikasi			164.673.000
3	Dari Dinas Kehutanan	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	1 Unit	2015	293.915.000
4	Dari Bagina Umum	Peralatan Studio dan - Komunikasi/	1 Unit		164.673.000
5.	Bidang Persandian dan Statistik	- SSB			

Sumber : Data Rekon Aset Dinas Komunikasi dan Informatika T.A. 2024

No.	Nama Ruang	Nama Barang	Banyaknya	Tahun Pembuatan	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KOMINFO.	- Sepeda Motor	1 unit	2019	18.050.000
		Pengadaan Gedung Kantor	1 Paket	2019	25.600.000
		- Pengadaan Meubelair	7 Unit	2019	40.000.000
		Pengadaan Peralatan Studio Visual-Proyektor-Attachment	1 Unit	2019	12.600 .000
		Pengadaan Peralatan Studio Visual – Kamera Digital	2 Unit	2019	30.000.000
		Pengadaan Peralatan Studio Visual – Kamera Digital dan Antena UHF	13 Unit	2020	153.975.000
		- Komputer/Laptop	2 Unit	2022	15.889.791
		- Belanja Aplikasi E-SDM	1 Paket	2022	179.980.000
		Pengadaan E-Surat dan E-Absensi	48 Unit	2022	149.280.000
		- Pengadaan Laptop	1 Unit	2022	20.000.000

Sumber : Data Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019-2024

1.5. KEUANGAN

Dalam Penetapan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 besarnya anggaran yang dialokasikan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan semuanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.906.981.712,-** tingkat penyerapannya sebesar **Rp. 1.665.570.357,-** atau **87.34%** (*delapan puluh tujuh koma tiga empat persen*).

Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.748.450.000,-** tingkat penyerapan Rp. **648.546820** atau **86.65%** (*delapn puluh enam koma enam lima persen*). Belanja Modal sebesar **Rp. 13.30.000**; Tingkat capaian 100% (*seratus persen*).

Selanjutnya anggaran yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024. Sementara realisasi untuk membiayai kegiatan belanja rutin, sebesar **Rp. 2.668.531.712,-** dengan tingkat penyerapan sebesar **Rp. 2.327.217.177** atau **87.21%** (*delapan puluh tujuh koma dua puluh sepuluh persen*).

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 tidak ada pembebanan PAD.

TABEL : 5
PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Dana	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1.	APBN	-	-	-
2.	APBD I	-	-	-
3.	APBD II	2.668.531,712,-	2.327.217.177,-	87,21,-
4.	DEKONSENTRASI	-	-	-
5.	BLNI	-	-	-
	JUMLAH :	2.668.531.712,-	2.327.217.177,-	87,21,-

Sumber Data : Laporan RFK Per 31 Desember Kominfo. TA. 2024

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Struktrur Organisasi

Menguraikan dasar pembentukn dan susunan organisasi Perangkat Daerah serta struktur organisasi.

1.2. Fungsi dan Tugas

Menguraikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3. Keadaan Pegawai.

Menguraikan tentang komposisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan tingkat pendidikan, jenis kelamin.

1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana.

Menguraikan tentang Jumlah dan Kondisi Riil Sarana dan Prasarana.

1.5. Keuangan.

Menguraikan tentang anggaran yang dikelola.

1.6. Sistematika (LKIP).

Menguraikan tentang sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.7. Isu-Isu Strategis.

Menguraikan tentang permasalahan utama (*strategic issud*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Perencanaan Strategis.

II.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.

Menguraikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

II.1.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan.

Menguraikan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.

II.2. Perjanjian Kinerja.

Menguraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

II.3. Rencana Anggaran Tahun Berjalan.

Menguraikan Perjanjian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

III.I. Capaian Kinerja Organisasi.

Menguraikan Capaian Kinerja meliputi :

1. Realisasi Indikator Kinerja.
2. Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu.
3. Realisasi Kinerja berdasarkan target jangka menengah.
4. Realisasi Kinerja berdasarkan standar nasional.
5. Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun (n).
6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun (n) dengan Tahun (n-1).

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Menguraikan tentang hasil evaluasi dan analisis capaian, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

III.3. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup.

IV.1. Simpulan Umum atau Capaian Kinerja Organisasi.

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

IV.2. Langkah untuk meningkatkan Kinerja Organisasi.

Menguraikan langkah untuk meningkatkan Kinerja Organisasi.

Lampiran :

- 1). Rencana Kinerja (Renja).
- 2). Perjanjian Kinerja (PK).
- 3). Rencana Aksi yang mencantumkan target secara priodik atas kinerja dan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- 4). Ukuran Kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya;
- 5). Lain-lain yang dianggap perlu.

1.7. Isu-Isu Strategis

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan Hasil Analisis isu-isu strategis yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, maka identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Perencanaan pembangunan tersebut antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisa *SWOT* yang dilakukan, maka informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah berdasarkan :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD;
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra PD-OPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan;
4. Hasil analisis KLHS;

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah :

Masalah yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana TIK sesuai perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah;

2. Struktur Organisasi yang baru terbentuk dengan (Perda) Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Belu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Badan Se - Kabupaten Belu;
3. Belum optimalnya kemampuan ASN bidang TIK;
4. Belum terintegrasinya sistem aplikasi layanan antar OPD;
5. Belum optimalnya tingkat pemahaman Badan Publik terhadap keterbukaan informasi dalam layanan informasi;
6. Tebatasnya eksistensi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM/Komsosdes);
7. Belum terbangunnya sarana dan prasarana TIK yang memadai;
8. Belum tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan operasional dalam bidang TIK;
9. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja;
10. Kurangnya komitmen dari sebagian ASN di dalam unit kerja;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan *Smart City* sebagai sebuah konsep kota perbatasan cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat, mudah dan aman kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
2. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Teknologi Informasi Komunikasi hingga akhir tahun 2024 diharapkan agar tersedianya Sumber Daya Manusia Teknologi Informatika Komunikasi di Desa sebanyak 81 Desa Persiapan dan 12 Kelurahan, 12 Kecamatan, 59

OPD di Kabupaten Belu termasuk kemampuan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sebanyak 15 orang.

3. Pengembangan Aplikasi elektronik berbasis database dan terintegritasi untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antar pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan *e-government* yang bersih dan baik dapat terlaksana hingga 2024 mencapai 35 OPD dari 59 OPD atau 59,32%.
4. Penyediaan jaringan komunikasi data dengan target dari 2G, 3G, 4G dan terancang sampai dengan 2024 sebanyak 100%.
5. Promosi dan publikasi daerah melalui media cetak baik majalah dan buletin, maupun pameran dan lain-lain. Target promosi dan publikasi pembangunan daerah sebanyak 1 kali per tahun melalui sinergitas melalui jumpa pers, penerbitan majalah kerjasama dengan media cetak dan media online 10 layanan, media cetak dengan Pos Kupang selama 1 tahun anggaran dan upaya pembentukan dan pengelolaan penyelenggaraan PPID Utama dan Pembantu dan Pejabat Penghubung SPAN LAPOR.
6. Pembinaan dan pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) hingga akhir tahun 2024 sudah terbentuk sebanyak 81,48% komunitas sedangkan target SPM sebesar 12 kelompok, sehingga capaian di atas target sebesar 91,60 persen.
7. Pembuatan spanduk promosi dan leaflet target per tahun 2 tema dan tercapai 4 tema dengan jumlah 500 eksemplar, capaian 100 persen.
8. Dialog interaktif dan dialog publik melalui jumpa pers target sebesar tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan

Tantangan (*Threats*) dalam melaksanakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika meliputi :

- a. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses dan layanan informasi;

- b. Perkembangan bidang komunikasi dan informasi yang semakin pesat dan kompleks membutuhkan regulasi yang mampu memfasilitasi dan mensinergikan berbagai kebutuhan di bidang TIK;
- c. Adanya ego sektoral antar OPD terkait integrasi publikasi data dan informasi;
- d. Upaya penerapan *e-government* saat ini masih sangat membutuhkan adanya literasi terhadap semua pemangku kepentingan;
- e. Sering terjadinya mutasi yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan.

Peluang (*Opportunities*) yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu :

Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legislative Kabupaten Belu;

- a. Tuntutan globalisasi dan daya saing daerah dalam rangka pemanfaatan TIK;
- b. Potensi penggalan Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi;
- c. Merupakan lokasi prioritas 3T dan perbatasan;
- d. Meningkatnya masyarakat yang melek IT;
- e. Adanya Otonomi Daerah;

Kekuatan dan kelemahan merupakan lingkungan internal Dinas Komunikasi dan Informatika ada pun peluang dan tantangan merupakan lingkungan eksternal. Dari Analisis SWOT tersebut diatas dapat diambil sejumlah **faktor kunci** yang akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Induk TIK sebagai acuan pembangunan TIK di Kabupaten Belu.
- b. Menempatkan ASN yang mempunyai kompetensi di bidang TIK.
- c. Pembuatan Regulasi yang mendukung terselenggaranya *e-government*.
- d. Meningkatkan keahlian ASN yang memiliki kualifikasi di bidang TIK.

- e. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dukungan pembiayaan dan pengembangan sarana prasarana TIK serta integrasi Data.
- f. Penyebaran informasi elektronik melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Belu dengan capaian 75 persen.
- g. Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah Target per tahun tersedianya buku data statistik sebanyak 25 buah buku belum terealisasi karena ketersediaan dana.
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan media baik cetak, elektronik maupun media luar ruang bagi terlaksananya layanan informasi, publikasi dan komunikasi pada masyarakat.
- i. Melakukan evaluasi dan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan TIK di Kabupaten Belu.

d. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

Penentuan isu-isu Strategis Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu 2024. Adapun isu –isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK. (SPBE).
2. Peningkatan SDM TIK.
3. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur jaringan pos dan telekomunikasi di daerah dan berbatasan.
4. Kualitas Layanan Informasi Publik dan Website serta Media Komunikasi Massa.
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritasi untuk menunjang pelaksanaan administrasi pemerintahan.
6. Pengelolaan bidang persandian dan statistik yang menunjang keamanan informasi.

Terobosan program maupun kegiatan kerjasama terus dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT maupun dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penyedia Pembiayaan dan Pemberdayaan Teknologi dan Informatika (*BP3TI*), Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, maupun Lembaga Persandian Negara serta Lembaga Penyedia Jasa Layanan di Bidang TIK baik negeri maupun swasta, Lembaga penyiaran, Balai Monitoring Kupang, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (*KPID*) NTT serta instansi terkait lainnya melalui Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, *Assesment*, *Fokus Group Discusion (FGD)*, Pelatihan, kursus maupun Bimbingan Teknis, Desain Review Meeting (*DRM*) dan lain-lain dalam rangka penguatan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pengelola TIK serta pengembangan Desa *Broadband*, *Smart City*, Rumah TIK, Radio maupun radio Komunitas, Media Televisi Swasta dan Nasional, Perangkat Peralatan Digital lainnya.

Upaya Pengelolaan dan Pengembangan *e-Government* oleh Pemerintah Daerah maupun Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi dan Dokumentasi (*PPID*) dan kegiatan lainnya juga terus dilakukan sejalan dengan adanya perkembangan regulasi yang digulirkan pemerintah pusat. Di samping upaya Pengelolaan dan Pengembangan Alat Pendukung Utama (*APU*) Persandian dan Statistik dalam mengamankan informasi tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah perbatasan.

Penyediaan sarana dan prasarana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi sejak tahun 2015 ketersediaan sarana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Belu semakin ditingkatkan dan telah dapat diwujudkan dengan program jaringan tower telkomsel di 12 (dua belas) Kecamatan.

Pada tahun 2015 telah terbangun 1(satu) *Site Base Transceiver Station (BTS)* di Desa Kewar Kecamatan Lamaknen sebagai tanda dimulainya upaya untuk menghilangkan *area blankspot* jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Belu, terutama di wilayah perbatasan dengan Negara RDTL. Pada Tahun 2016 telah dibangun lagi 4 (empat) *Site BTS* di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur.

Program pengentasan jaringan maupun peningkatan kemampuan jaringan 2G, 3G, 4G di wilayah ini telah terlaksana sejak Tahun 2017, termasuk penyusunan perencanaan TIK sebagai upaya dalam rangka pembangunan jaringan *Fiber Optic (FO)* maupun Penguat *Signal Monopole 4G* yang berfungsi sebagai penerangan jalan umum di Kabupaten Belu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun ke depan tentunya dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Belu yaitu ***“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”*** yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Atas dasar itu, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

Tabel : II.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA, TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mewujudkan good governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Nilai SAKIP	CC/51,5	CC/52	CC/54	CC/56	CC/58	B/60
			2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	1.5	2.2	2.3	2.5	2.5
			3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	1.5	2.2	2.3	2.5	2.5
			4 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	20	40	60	80	100
			5 Proporsi Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	-	20.59	41.18	61.76	82.35	100

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2026

Tabel : II.1.2.**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan strategis masing-masing agenda pembangunan yang akan menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan strategis pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan agenda pembangunan. Atas dasar itu misi, agenda dan tujuan strategis mempunyai keterkaitan sebagaimana uraian pada tabel II.1.2. di bawah ini :

Tabel : II.1.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Nilai SAKIP	CC/51,5	2.965.835.287	2.977.894.902	3.036.012.310	3.049.016.312	3.107.175.802	15.145.934.613
1.	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.800.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	2.167.559.397	2.692.430.517	2.759.741.280	2.828.734.812	2.899.453.182	2.971.939.512	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	304.830.500	65.500.000	65.500.000	50.000.000	23.187.710	11.745.430	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	110.579.649	50.000.000	50.000.000	48.638.749	23.187.710	11.745.430	

5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	125.267.700	137.904.770	62.65.622	48.638.7490	23.187.710	11.745.430	
II	SPBE	632.170.500	633.434.841	634.701.711	635.971.114	637.243.056	838.517.542	4.218.385.806
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	582.688.000	633.434.841	643.701.711	635.971.114	637.243.056-	838.517.542	4.218.385.806
III	SPBE	84.660.000	84.829.320	86.498.979	86.671.977	86.845.321	387.019.011	731.864.608
1	Terselenggaranya E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	92.630.000	84.829.320	86.498.979	86.671.977	86.845.321	387.019.011	731.864.608
IV	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	125.000.000	125.250.000	125.500.000	125.751.501	126.003.004	753.507.509
1	Terselenggaranya Statistik Sektoral	-	125.000.000	125.250.000	125.500.000	125.751.501	126.003.004	753.507.509
V	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi	-	50.500.416	55.550.458	61.105.503	67.216.054	73.937.659	382.247.749
1	Terselenggara nya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	50.500.416	55.550.458	61.105.503	67.216.054	73.97.659	382.247.749

SumberData : Renstra Teknikratik Kominfo. Tahun 2021 – 2026

Tabel II.2. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE	1 Indeks SPBE	2,3

Sumber : Data PK Kominfo Tahun 2024

“Indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya”

TABEL II.3.
RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output		Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP CC/56 predikat / angka		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,906,981,712
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58,050,000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	75,698,000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ang disediakan	Lancarnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,882,000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	2,3 angka	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	435,920,000

Sumber: Data DPA-DPPA Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu secara keseluruhan diperlukan Indikator Kinerja yang meliputi : Input (Masukkan), Output (Keluaran), Outcomes (Hasil), Benefit (Manfaat), dan Impact (Dampak) serta analisis proses pencapaian Indikator Kinerja tergambar dalam tabel : 3.1.1. di bawah ini :

1. Realisasi Indikator Kinerja

TABEL : III.1.1
REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1	2	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	1	Indeks SPBE	2,3	2,47	107,39

Sumber : Data Indeks SPBE Tahun 2024

“Indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya”.

2. Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu

TABEL : III.1.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN (2024)
DENGAN TAHUN (2023)

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi		Capaian %
					Realisasi 2023	Realisasi 2024	
1	2	1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	1	Indeks SPBE	2,3	2,29	2,47	7,83

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2026

Nilai Indeks SPBE

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Realisasi Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah

TABEL : III.1.3

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi 2024	Capaian %
1	2	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	1	Indeks SPBE	2,6	2,47	95,00

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2026

Nilai Indeks SPBE

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
3. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG DALAM RENSTRA**

4. Realisasi Kinerja Berdasarkan Standar Nasional

**TABEL : III.1.4
PERBANDINGANREALISASI KINERJATAHUN 2024
DENGAN CAPAIAN NASIONAL**

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian %
2	3	4	5
		NIHIL	

ncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Belu Tahun 2021-2026

5. Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun 2024

**TABEL : III.1.5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2024**

No.	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), kegiatan dan sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	(%)	100	88,17	88,17
1	Perencanaan, Penaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(%)	-	-	-
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(%)	100	94,83	94,83
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	21	15	71,43
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100

Sumber Data : Capaian Indikator Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), kegiatan dan sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	(%)	100	99.50	99.50
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Paket	1	1	100.00
02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Diadakan	Paket	2	2	100.00
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	3	100.00
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	99.16
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	(%)	100	91.39	91.39
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	-
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Laporan	12	12	91.39
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	-	-	-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	(%)	100	88.48	88.48
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perirangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilakukan	Unit	15	15	88.48

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	(%)	100	82,31	82,31
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	(%)	100	82,31	82,31
07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	10	8	80,00
10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	KIM	81	81,00	100,00

Sumber : Capaian Indikator Program dan Kegiatan DPA-DPPA Kominfo. T.A. 2024

- ✓ Layanan Hubungan Media target 10 Media, tidak mencapai target karena berdasarkan Kerjasama dengan pemerintah hanya 8 media yang terealisasi atau sesuai (PKS) kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Tahun (2024) Dengan Tahun (2023) dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL : III.1.6
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	100%	100%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0%
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	01	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84,07	87,34
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	03	Jumlah Pengelolaan Keuangan SKPD dan Tenaga Honorer Yang Dibayar	72,28	94,84
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	100%
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	01	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang Disediakan	0	0,00
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	100	100,00
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	100	0
	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	08	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	100
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	09	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dikuti	0	99,16
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	0,00
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88,16	91,39
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	100,00	0,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	93,44	88,48
	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	09	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	0	0
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5 Unit	5 Unit
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	100%	100%
	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	05	Jumlah Liputan Yang Dikelola Dalam Media Komunikasi	0,00	0,00
	06 Pelayanan Informasi Publik	06	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Yang Diadakan	0,00	0,00
	07 Layanan Hubungan Media	07	Jumlah Layanan Hubungan Media	100,00	92,29
	10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	10	Jumlah Kegiatan Studi Banding Yang Diadakan	0,00	73,21
	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	12	Jumlah KIM Yang Dibina Di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00
III	Program Aplikasi Informatika		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%
1	Pengelolaan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Meningkatnya Pengelolaan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
	03 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	07	Jumlah E-Surat dan E-Absensi Yang Dibangun	0,00	0,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	10	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Yang Diadakan	0,00	0,00

Sumber Data : Capaian Indikator Program dan Kegiatan 2024

3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

a. Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2024.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

b. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Metodologi Evaluasi SPBE Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Terhadap capaian indikator SPBE yang telah diperoleh maka evaluasi dan analisis terhadap capaian tersebut sebagai berikut :

a. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024, di mana indikator kinerja Nilai SPBE yang ditetapkan (Predikat/ Angka) sebesar 2,3 sedangkan realisasi sebesar 2,47 yang berarti tingkat capaiannya **100%** dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

b. Faktor Pendukung Indikator Ini :

1. Kekuatan dan Kelemahan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Pemenuhan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola Pemkab. Belu dimuat dalam 2 kebijakan yaitu : 1. Perbup Belu Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Pada indikator 1-2 (kebijakan internal arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE) tergolong memuaskan (5), namun pada kebijakan yang lebih spesifik (manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, jaringan intra, sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit TIK, dan tim koordinasi) tingkat kematangannya mengalami pelemahan. Hal ini berpengaruh secara signifikan pada implementasi SPBE yang tercermin pada domain Tata Kelola dan Manajemen yang nilainya paling rendah.
- Kekuatan Dalam pemenuhan Aspek Kebijakan Internal SPBE, Pemkab. Belu kuat pada indikator kebijakan internal arsitektur SPBE dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE dengan tingkat kematangan 5.
 - Kelemahan Kebijakan internal SPBE Pemkab Belu dimuat dalam 1 kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE, sehingga pengaturan penyelenggaraan indikator 1-10 tidak dilakukan secara spesifik.
3. Perencanaan Strategis SPBE Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum terpenuhi oleh Pemkab Belu, dengan tingkat kematangan indikator 11-14 berada pada level 1. Perlu penyelarasan dan penguatan kapasitas pada Pemkab. Belu dalam menerjemahkan peta rencana dan arsitektur SPBE nasional untuk disusun dalam peta rencana dan arsitektur SPBE Pemkab. Belu.
- Kekuatan tidak ditemukan adanya kekuatan dalam penerapan Aspek Perencanaan Strategis SPBE di Kab. Belu
 - Kelemahan belum ada Peta Rencana dan Arsitektur SPBE pada Pemkab. Belu.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum terpenuhi oleh Pemkab Belu, dengan tingkat kematangan indikator 15-18 berada pada level 1-2. Hal ini merupakan implikasi dari belum adanya Peta Rencana dan Arsitektur SPBE dalam pemerintahan Kab. Belu.

Pemenuhan aspek Perencanaan Strategis perlu menjadi perhatian bersama agar SPBE bisa diimplementasikan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Kekuatan Tidak ditemukan adanya kekuatan dalam penerapan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kab. Belu.
- Kelemahan Belum adanya Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Kab. Belu mengakibatkan lemahnya implementasi aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Penyelenggara SPBE sudah dibentuk Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Pemkab. Belu (tingkat kematangan level 2) dan kolaborasi SPBE sudah berjalan (tingkat kematangan level 3). Meski demikian diperlukan sosialisasi atau edukasi dari pemerintah pusat untuk meminimalisasi gap pemahaman baik secara strategis, manajemen, dan teknis terkait dengan domain, aspek, dan indikator dalam SPBE agar implementasi SPBE bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, perlu upaya untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk lintas instansi dan sektor, dalam mewujudkan integrasi layanan dan inovasi SPBE di Pemkab. Belu.

- Kekuatan kolaborasi SPBE pada Pemkab Belu sudah berjalan. Meski demikian, diperlukan penguatan kolaborasi agar pelaksanaan SPBE bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mewujudkan SPBE yang berdampak di Kab. Belu.
- Kelemahan Tim koordinasi SPBE di Kab. Belu perlu diberikan penguatan karena berperan dalam implementasi SPBE yang berdampak di Kab. Belu. Diperlukan bimbingan, sosialisasi, edukasi, dan pelibatan berbagai pihak, termasuk lintas instansi dan sektor secara bergotong royong.
- Penerapan Manajemen SPBE Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum terpenuhi oleh Pemkab Belu, dengan tingkat kematangan indikator 21-28 berada pada level 1.

Belum tersedia bukti dukung yang memadai untuk delapan indikator pada aspek penerapan manajemen SPBE, yaitu Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan.

- Kekuatan tidak ditemukan adanya kekuatan dalam penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kab. Belu.
- Kelemahan Belum tersedia bukti dukung yang memadai untuk delapan indikator pada aspek penerapan manajemen SPBE, yaitu Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan. Perlu penguatan tim koordinasi SPBE yang diharapkan dapat menyediakan ruang dialog bagi para aktor yang memiliki peran dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem yang sedang dikembangkan.
- Pelaksanaan Audit TIK Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum terpenuhi oleh Pemkab Belu, dengan tingkat kematangan indikator 29-31 berada pada level 1. Belum tersedia bukti dukung yang memadai untuk tiga indikator pada aspek pelaksanaan audit TIK, yaitu Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, Audit Keamanan SPBE.
- Kekuatan Tidak ditemukan adanya kekuatan dalam penerapan Aspek Pelaksanaan Audit TIK di Kab. Belu.
- Kelemahan Belum tersedia bukti dukung yang memadai yang menunjukkan pelaksanaan Audit TIK untuk tiga indikator pada aspek pelaksanaan audit TIK, yaitu Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, Audit Keamanan SPBE. Diperlukan bimbingan, sosialisasi, edukasi, dan pelibatan berbagai pihak terkait pelaksanaan audit SPBE di Kabupaten Belu.

6. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab. Belu telah mengadopsi berbagai aplikasi nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan tingkat kematangan pada indikator 32-41 berada pada rentang level 2-4. Perlu membangun pemahaman dalam melihat aplikasi-aplikasi tersebut sebagai sistem yang terhubung melalui pemetaan untuk tiap aplikasi yang digunakan, mana saja aplikasi yang sifatnya koordinasi secara terpusat dan mana yang boleh dan perlu dikembangkan oleh setiap IPPD. Elemen dalam pemetaan ini meliputi :

- (a) Nama aplikasi
- (b) Deskripsi singkat
- (c) Fungsi
- (d) Modul apa saja yang dikembangkan di dalam app/sistem tersebut
- (e) Siapa yang mengembangkan
- (f) Sifat app/sistem (*open system/closed system*)
- (g) Siapa penggunaanya
- (h) Web based/API/PC based
- (i) Fungsi apa yang belum terlayani dari aplikasi ini.
 - Kekuatan Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik pada indikator 32-36 (Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, dan Layanan Kinerja Pegawai) memiliki tingkat kematangan level 4.
 - Kelemahan Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik pada indikator 37-41 (Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah) memiliki tingkat kematangan level 2.

7. Layanan Publik Berbasis Elektronik Kab. Belu telah mengadopsi berbagai aplikasi nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan Layanan Publik Berbasis Elektronik, dengan tingkat kematangan pada indikator 42-47 berada pada rentang level 2-4. Indikator Layanan Data Terbuka merupakan indikator yang paling lemah (tingkat kematangan level 2). Banyaknya aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE memerlukan pemahaman dalam melihat aplikasi-aplikasi layanan publik tersebut sebagai sistem yang terhubung melalui pemetaan untuk tiap aplikasi yang digunakan, mana saja aplikasi yang sifatnya koordinasi secara terpusat dan mana yang boleh dan perlu dikembangkan oleh setiap IPPD. Elemen dalam pemetaan ini meliputi :
- (a) Nama aplikasi
 - (b) Deskripsi singkat
 - (c) Fungsi
 - (d) Modul apa saja yang dikembangkan di dalam app/sistem tersebut
 - (e) Siapa yang mengembangkan
 - (f) Sifat app/sistem (open system/closed system)
 - (g) Siapa penggunanya
 - (h) Web based/API/PC based
 - (i) Fungsi apa yang belum terlayani dari aplikasi ini. Selain itu, perlu menjadi perhatian bersama bagaimana membangun mekanisme feedback loop, di mana publik sebagai pengguna bisa memberikan masukan agar pengembang sistem bisa memahami titik butanya dan melakukan perbaikan secara berkesadaran.
- Kekuatan Pemenuhan aspek layanan publik berbasis elektronik yang sangat baik dan memuaskan pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (level 4) dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (level 4).

Kabupaten Belu telah menginisiasi layanan publik yang beragam, dengan fokus pada pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan Peningkatan Investasi di Daerah melalui kemudahan perizinan.

- Kelemahan Indikator Layanan Data Terbuka merupakan indikator yang paling lemah (tingkat kematangan level 2). Sementara itu, Layanan Publik Sektor 1-3 memiliki tingkat kematangan level 3 (Baik). Meskipun aplikasi pelayanan publik, baik aplikasi nasional maupun yang dikembangkan sendiri, telah dimanfaatkan dengan baik, perlu diperhatikan bersama bagaimana penggunaan aplikasiaplikasi ini bisa lebih terukur dampaknya.

REKOMENDASI

Kabupaten Belu menghadapi tantangan besar dalam implementasi SPBE, terutama akibat kurangnya pemahaman mendalam terhadap kebijakan-kebijakan dan proses bisnis, baik itu yang bersifat *top down* dari Pemerintah pusat dan berlaku secara nasional ataupun yang diturunkan dari kebijakan khusus yang berlaku di PEMDA tersebut. Hal ini memberikan berdampak signifikan pada pemenuhan 8 aspek SPBE. Secara keseluruhan, kebijakan dan perencanaan strategis memiliki peran yang fundamental dan perlu diperkuat agar implementasi SPBE bisa berjalan lebih efektif dalam IPPD. Terdapat kecenderungan di mana domain kebijakan, tata kelola dan manajemen memiliki tingkat kematangan yang lemah namun melonjak pada domain layanan. Oleh karena itu, perlu direfleksikan bersama bagaimana kebijakan-kebijakan yang berfungsi sebagai landasan strategis dapat disusun dan dimaknai secara berkesadaran untuk mendukung tata kelola dan manajemen yang kokoh. Kebijakan yang kuat dan terarah seharusnya mampu menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya mendorong efektivitas operasional tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan.

Refleksi ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan dapat menjadi katalisator dalam memperkuat integrasi, efisiensi, dan inovasi di seluruh domain SPBE, sehingga tercapai keselarasan antara perencanaan strategis, tata kelola, dan layanan publik yang berdampak nyata. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu:

1. Pentingnya penguatan kemampuan dalam memahami kebijakan dan bisnis proses yang diturunkan dari kebijakan yang dikembangkan dan diterapkan, baik itu yang bersifat *top down* dari Pemerintah pusat dan berlaku secara nasional ataupun yang diturunkan dari kebijakan khusus yang berlaku di PEMDA tersebut.
2. Pentingnya proses sosialisasi atau edukasi untuk meminimalisasi gap pemahaman baik secara strategis, manajemen, dan teknis terkait dengan Domain, Aspek, dan Indikator dalam SPBE, yang sifatnya dua arah, di mana terjadi proses downloading materi pelatihan, pemaknaan kembali (*mirroring*), penyelarasan pemahaman (*alignment*), hingga bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan yang lebih mendasar baik pada aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.
3. Pentingnya penguatan tim koordinasi SPBE yang diharapkan dapat menyediakan ruang dialog bagi para aktor yang memiliki peran dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem yang sedang dikembangkan.
4. Pentingnya penguatan leadership di setiap level jabatan dalam organisasi, dan bagaimana mendapatkan komitmen dari pimpinan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Bagaimana caranya kita bisa memperkuat dan mendapatkan komitmen dari Pimpinan.
5. Untuk menjadi sistem yang terhubung, perlu ada pemahaman dan pemetaan untuk tiap aplikasi yang digunakan, mana saja aplikasi yang sifatnya koordinasi secara terpusat dan mana yang boleh dan perlu dikembangkan oleh setiap IPPD . Elemen dalam pemetaan ini meliputi :

- (a) Nama aplikasi
 - (b) Deskripsi singkat
 - (c) Fungsi
 - (d) Modul apa saja yang dikembangkan di dalam app/sistem tersebut
 - (e) Siapa yang mengembangkan
 - (f) Sifat app/sistem (open system/closed system)
 - (g) Siapa penggunanya
 - (h) Web based/API/PC based
 - (i) Fungsi apa yang belum terlayani dari aplikasi ini.
6. Jika SPBE ini adalah sebuah sistem yang hidup, maka diperlukan adanya sub sistem yang memberikan fokus perhatian untuk proses perbaikan secara berkesinambungan (*continuous improvements*), yaitu belum ada mekanisme komunikasi yang memungkinkan adanya proses :
- (a) berbagi data dan informasi.
 - (b) proses mengendapkan dan mirroring.
 - (c) proses reflektif, dari pemahaman yang didapatkan terkait dengan konteks atau situasi yang relevan dari setiap lokus.
 - (d) proses mentoring.
 - (e) proses sharing pembelajaran. Dengan adanya mekanisme ini maka dapat terjadi proses feedback loop yang membuat sistem memiliki kemampuan untuk memahami titik butanya dan melakukan perbaikan secara berkesadaran. Proses ini dapat terjadi dalam cycle dengan pengguna, dengan pengelola sistem, dan dengan pengembang sistem Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga) No Indikator Nilai Tingkat Kematangan 2024 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- 5 2.

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 5 3 Tingkat Kematangan
 Kebijakan Internal Manajemen Data 4 4 Tingkat Kematangan
 Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 3 5 Tingkat
 Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 3 6
 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 3 7 Tingkat Kematangan
 Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 3 8 Tingkat Kematangan
 Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 3 9 Tingkat
 Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 3 10 Tingkat
 Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi
 Pusat/Pemerintah Daerah 3 11 Tingkat Kematangan Arsitektur
 SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 1 12 Tingkat
 Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
 Daerah 1 13 Tingkat Kematangan

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE 1 14 Tingkat
 Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 1 15 Tingkat
 Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 2 16 Tingkat
 Kematangan Layanan Pusat Data 1 17 Tingkat Kematangan
 Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 1 18
 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2 19 Tingkat Kematangan
 Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
 Daerah 2 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE 3
 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE 1
 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan
 Informasi 1 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen
 Data 1 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
 1 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya
 Manusia SPBE 1 26 Tingkat Kematangan Penerapan

Manajemen Pengetahuan 1 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan 1 28.

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE 1
29 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
1 30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE 1
31 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE 1
32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 4 33 Tingkat
Kematangan Layanan Penganggaran 4 34 Tingkat Kematangan
Layanan Keuangan 4 35 Tingkat Kematangan Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa 4 36 Tingkat Kematangan Layanan
Kepegawaian 4 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan
Dinamis 2 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah 2 39 Tingkat Kematangan
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah 2 40 Tingkat
Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 3 41
Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 4 42 Tingkat
Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 4 43
Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka 2 44 Tingkat
Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) 4 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik
Sektor 1 3 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 3
47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 3.

8. Adanya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belu Bidang TIK.
9. Adanya kebijakan internal Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Belu berupa Keputusan Bupati Belu Nomor 215/HK/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 268/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Belu;
10. Adanya Penguatan Kolaborasi melalui Coaching Clinic SPBE oleh Dinas Kominfo Prov NTT Kupang dalam percepatan implementasi SPBE di Kabupaten Belu.
Adanya Penguatan kebijakan SPBE melalui Review Perbup tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Belu.

11. Adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait lainnya Dinas Kominfo Kab. Belu, BPKAD Kab. Belu, BP4D Kab. Belu dan Dinas Kesehatan Kab. Belu bersama USAid ERAT dalam melakukan kajian proses reuiu tindak lanjut SPBE;
12. Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Belu; dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Pembentukan Tim Asesor Sistem Pemerintahan Barbasis Elektronik.
13. Adanya penggunaan aplikasi layanan publik berbagi paket oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara formal dalam rangka melakukan duplikasi penggunaan aplikasi “SIHEBAT” milik Pemerintah Kota Kupang.
14. Adanya dukungan dari USAID ERAT. Dukungan tersebut antara lain dalam bentuk pelatihan dan bimtek, baik dalam daerah maupun keluar daerah yang dibiayai oleh USAID ERAT.
14. Adanya dukungan dari Pemerintah seseuai Keputusan Bupati Belu Nomor 219/HK/2024 tentang Penetapan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Belu;

c. Langkah - Langkah Antisipatif Yang Diambil

Tindak lanjut/ upaya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dalam menanggulangi masalah/ hambatan di atas adalah :

1. Perlu adanya tambahan dukungan dana, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah *Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi* menuju pemerintahan *good govenance*.
2. Perlu adanya tambahan Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dalam bidang IT;

3. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai berupa bangunan gedung kantor, peralatan gedung kantor, perlengkapan gedung kantor, alat studio dan komunikasi, serta kendaraan dinas/operasional;

3.3. REALISASI ANGGARAN :

- a. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

**TABEL : III.3.
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN**

No.	Jenis Belanja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.668.531.712	2.327.217.177	87,21
1	Perencanaan, Penanggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.965.031.712	1.720.620.557	87,56
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.981.712	1.665.570.557	87,34
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.050.000	55.050.000	94,83
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.698.000	75.318.000	99,50
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.100.000	13.100.000	100,00
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.378.000	8.378.000	100,00
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000	100,00
09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.220.000	44.840.000	99,16
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.881.800	83.973.116	80,06
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.882.000	83.973.116	91,39
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.999.800	-	-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	88.482.750	88,48
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	88.482.750	88,48
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	435.920.000	358.822.954	82,31
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	435.920.000	358.822.954	82,31
05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-
06	Pelayanan Informasi Publik	-	-	-
07	Layanan Hubungan Media	260.920.000	230.713.484	88,42
10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	175.000.000	128.109.470	73,21
12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-

Sumber Data : Target dan Realisasi DPA-DPPA Kominfo. Tahun 2024

b. Realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2024, hasil pengukuran kinerja terhadap Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu kisaran nilai **87,21%** ini artinya sebagian besar Program dan Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai yang direncanakan, tentu ada beberapa Program dan Kegiatan di Renstra yang tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan pendanaan pada Tahun 2024 sehingga program dan kegiatan yang ada di Renstra ditiadakan, tentu ini akan mengurangi target dan realisasi di akhir Renstra.

c. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2024 realisasi semua program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja sesuai dengan yang direncanakan selain 2 program yang telah disebutkan di atas.

d. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2024, hasil pengukuran kinerja terhadap Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu tidak ditemukan program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, rata-rata program dan kegiatan serta sub kegiatan pencapaiannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan/direncanakan.

e. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya dan terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 adalah :

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2024, hasil pengukuran kinerja terhadap Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu menunjukkan bahwa semua program tidak mencapai target dengan rata-rata tingkat capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak mencapai target 100% namun hanya 87,21% ini disebabkan karena dari target 21 orang PNS yang direncanakan hanya terealisasi 15 orang PNS karena adanya PNS yang memasuki masa purna tugas atau pensiun pada akhir Tahun 2024. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mencapai target 100% baik target maupun anggaran yang direncanakan.

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran sebesar Rp. 1.906.981.712,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar Rp. 1.665.570.350,- atau (87,34%) alasan tidak mencapai target 100% dikarenakan pada akhir tahun 2024 ada ASN yang memasuki masa purna tugas/pensiun dan juga ASN yang SPT ke Dinas Lain;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pagu anggaran sebesar Rp. 28.200.000,- dengan tingkat capaiannya Rp. 25.200.000,- atau (94,83%) kategori tidak mencapai target 100%, karena dalam perencanaan direncanakan Bendahara Penerimaan sebesar Rp.

3.000.000,-, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tahun 2024, tidak mendapat pembebanan PAD sehingga menyebabkan penyerapannya anggarannya tidak dilaksanakan dan masuk dalam sisa dana lebih perhitungan Tahun sebelumnya.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 5 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor masuk dalam DPPA TA. 2024, masuk dalam Belanja Modal Alat Studio Lainnya dan Belanja Modal Personil Komputer dengan tingkat capaian sebesar (100%) mencapai target.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor masuk dalam Belanja ATK semua terpakai habis dan sesuai target pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 dengan penyerapan mencapai target (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu masuk dalam DPPA TA. 2024 dengan penyerapan (100%) mencapai target.
- Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan dengan hasil capaian kinerja (100%); sesuai target pada DPPA T.A. 2024;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/Perjalan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi sebesar Rp. 45.220.000,- dengan tingkat capainnya (99,16%) alasan tidak mencapai target karena masih ada sisa dana pada belanja transportasi atambua-kupang sebesar Rp. 380.000;

c. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 1 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.882.000,- tingkat capaian Rp. 83.973.116,- atau (91,39%) alasan tidak mencapai target karena pada belanja

tagihan listrik penyerapannya hanya (34,09%) dari pagu Rp. 12.000.000; hanya terserap 4.091.116; kategori tidak mencapai target 100% alasan tidak mencapai target karena adanya keterbatasan pengisian daya /token prabayar.

Sub Kegiatan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan tingkat capaian (100%) dari pagu Rp. 77.782.000,-.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 1 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 100.000.000,- dengan tingkat capai realisasi Rp. 88.482.750,- atau (88,48%) tidak mencapai target alasan tidak mencapai target 100%, karena pada item belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Rp. 14.000.000,- hanya terserap 3.137.750 atau (21,38%).

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdapa 1 Kegiatan yakni : Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media pagu anggaran sebesar Rp. 260.920.000,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar Rp. 230.713.484,- atau (92,29%); kategori tidak berhasil karena masih ada sisa dana pada kegiatan jumpa pers tidak dilaksanakan sehinga menyebabkan anggaran tidak dibelanjakan dan menjadi sisa dana SILPA sebesar Rp. 30.206.516;

- b. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik sebesar Rp. 175.000.000,- dengan tingkat capaian sebesar Rp. 128.109.470,- atau (73,21%) alasan tidak mencapai target 100%, karena adanya kegiatan kerjasama (MOU) antara Atambua TV dengan Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, yang mana dalam perjanjian kerjasamanya terdapat target kinerja yang harus dicapai, namun dalam pelaksanaannya berjalan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi target kinerja yang telah disepakati bersama, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 46.890.530,-.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan dana bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah *Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi* menuju pemerintahan *good governance*.
2. Perlu adanya tambahan Aparatur Sipil Negara yang berkompeten, dalam bidang IT mengingat keterbatasan SDM Aparatur;
3. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai berupa bangunan gedung kantor, peralatan gedung kantor, perlengkapan gedung kantor, alat studio dan komunikasi, serta kendaraan dinas/operasional.
4. Perlu adanya pelatihan-pelatihan teknis di bidang IT, sehingga bisa menambah wawasan ASN dalam memahi IT dan dapat meningkatkan indeks SPBE di Pemerintah Kabupaten Belu.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Organisasi.

Akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini tersusun diharapkan dapat memberikan gambaran rinci atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu selama Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana telah diuraikan dalam Bab – Bab terdahulu, dapat disampaikan bahwa dalam Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari prosentase target dan realisasi anggaran yang cukup dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yakni : **87,21% (delapan puluh tujuh koma dua puluh satu persen).**

4.2. Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi.

Walaupun tingkat pencapaian realisasi anggaran menunjukkan hasil yang cukup namun dikaitkan dengan Visi dan Misi yang harus dicapai dapat dikatakan bahwa masih cukup banyak kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut, mengingat cukup kompleksnya permasalahan yang dihadapi.

Disadari pula bahwa adanya berbagai keterbatasan maka laporan ini belum sempurna. Namun demikian diharapkan disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, laporan ini kiranya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sekaligus memberikan umpan balik dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi Dan Informatika dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah di Wilayah Kabupaten Belu sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atambua, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BELU,


FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760928 200112 1 005

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Bidang Urusan/ SKPD/ PROGRAM/ Kegiatan/ Sun Kegiatan Misi RPJMD		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif		Lokasi
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											2.668.531.712		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								2.232.611.712		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	100%				100%	2.232.611.712		
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%				100%	-		
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera		-	APBD II	Atambua
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				100%	1.965.031.712		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.906.981.712	APBD II	Atambua
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		58.050.000	APBD II	Atambua
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%				100%	75.698.000		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang Disediakan	4 Jenis	Peningkatan Layanan Masyarakat dan Kinerja Aparatur		-	APBD II	Atambua

Kode					Bidang Urusan/ SKPD/ PROGRAM/ Kegiatan/Sub Kegiatan Misi RPJMD	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif		Lokasi
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah Dana	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah		13.100.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah		8.378.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	Lancarnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	APBD II	Kab. Belu
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah		9.000.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah		45.220.000	APBD II	Provinsi dan Luar Provinsi
2	16	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				100%	91.882.000		
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	Lancarnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91.882.000	APBD II	Kab. Belu

Kode					Bidang Urusan/ SKPD/ PROGRAM/ Kegiatan/Sub Kegiatan Misi RPJMD	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif		Lokasi
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah Dana	Sumber Dana	
2	16	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100%	100.000.000		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur		100.000.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	02	2.01	-	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	435.920.000		
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media			Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	10 Layanan	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota		260.920.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Jumlah Kegiatan Studi Banding Yang Diadakan	81 KIM	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota		175.000.000	APBD II	Kab. Belu

Atambua, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Belu,



FRDRIKUS L. BERE MAU, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19760928 200112 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Formula Indikator	Metodologi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE	1. Indeks SPBE	2,3	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Data Kinerja dikumpulkan melalui kegiatan Pembentukan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Belu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu

Atambua, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belu,



FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19760928 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU

PERJANJIAN KINERJA
(PK)
TAHUN ANGGARAN 2024



Jalan El Tari No. 1 Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0389) 213564 **Email : dinaskominfo@belukab.go.id**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp.PD-KGEH, FANASIM
Jabatan : BUPATI BELU

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian inidan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Atambua, 24 Januari 2024



PIHAK KEDUA,

dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp.PD-KGEH, FINASIM



PIHAK PERTAMA,

FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	SPBE	2,3

B. Pelaksanaan Anggaran

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.	2.147.516.204	PAD+DAU+/PBHP
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp.	410.920.000	PAD+DAU+/PBHP
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp.	-	
	TOTAL :	Rp.	2.558.436.204	

C. Penandatanganan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa paling lambat tanggal 31 Maret 2024 (dikecualikan kontrak Tahun jamak).

D. Penyampaian LKPD dan LPPD/LKPJ paling lambat Tanggal 31Maret 2024.

E. Penyampaian LKIP paling lambat 19 Februari 2024.

F. Nilai pelaksanaan SAKIP Minimal kategori BB (>70-80).

G. Rata-rata realisasi kinerja individu dalam SKP minimal sesuai ekspektasi;

H. Presentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP 100%.

I. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik minimal kategori baik (76, 61-88,91);

J. Presentase report kepatuhan LHKPN 100%;

K. Jadwal penyampaian RFK paling lambat tanggal 6 tiap bulan.



PIHAK KEDUA,

dr. TAQLIN AGUSTINUS, Sp.PD-KGEH, FINASIM



Atambua, 24 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

FREDRIKUS L. BERE MAU, ST



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALOYSIUS CONZAGA KLAU, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

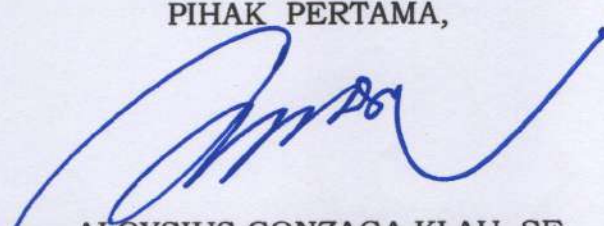
Atambua, 24 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

PIHAK PERTAMA,



ALOYSIUS CONZAGA KLAU, SE

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

A SASARAN STRATEGIS

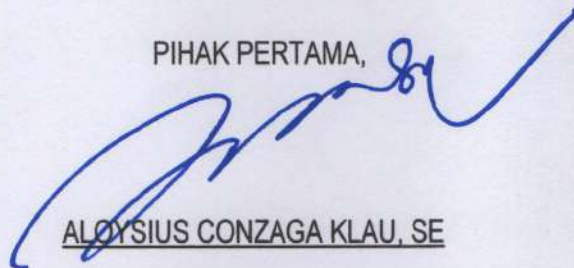
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	NILAI SAKIP	CC/56 Angka

B. PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.879.936.204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum+PAD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	44.080.000	PAD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	123.500.000	PAD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	100.000.000	PAD
TOTAL :		Rp.	2.147.516.204	


PIHAK KEDUA,
FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Atambua, 24 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,

ALOYSIUS CONZAGA KLAU, SE



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRISILA BETE BEREK, S.SOS

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALOYSIUS CONZAGA KLAU, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

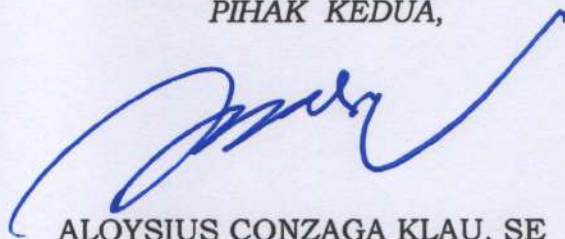
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Atambua, 24 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



ALOYSIUS CONZAGA KLAU, SE

PIHAK PERTAMA,



PRISILA BETE BEREK, S. SOS

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

A SASARAN STRATEGIS

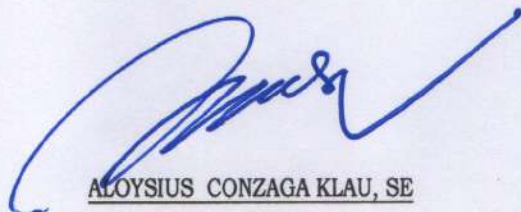
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	NILAI SAKIP	CC/56 Angka

B. PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	123.500.000	PAD
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	100.000.000	PAD
	TOTAL :	Rp.	223.500.000	

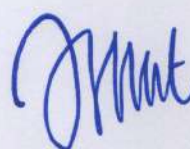
ATAMBUA, 24 JANUARI 2024

PIHAK KEDUA,



ALOYSIUS CONZAGA KLAU, SE

PIHAK PERTAMA,



PRISILA BETE BEREK, S.Sos



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZELIA L. DA COSTA, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Layanan Informasi Publik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Atambua, 24 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

PIHAK PERTAMA,



ZELIA L. DA COSTA, S.STP

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

A. SASARAN STRATEGIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	SPBE	2,3

B. PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (SPBE)	Rp.	-	
TOTAL :		Rp.	-	

ATAMBUA, 24 JANUARI 2024

PIHAK PERTAMA,



ZELIA L. DA COSTA, S.STP



FREDRIKUS L. BERE MAU, ST



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRDAUS, SE

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

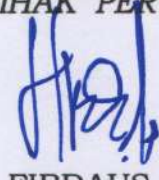
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Atambua, 24 Januari 2024


PIHAK KEDUA,
FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

PIHAK PERTAMA,

FIRDAUS, SE

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

A. SASARAN STRATEGIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (SPBE)	SPBE	2,3

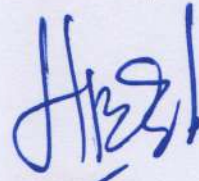
B. PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
III	PROGRAM APLIKASI INFORMASI			
1	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SPBE)	Rp.	-	
	TOTAL :	Rp.	-	

ATAMBUA, 24 JANUARI 2024

PIHAK KEDUA,

FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

PIHAK PERTAMA,

FIRDAUS, SE



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DOMINIKUS MALI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

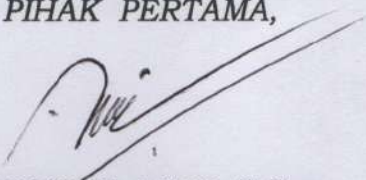
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Atambua, 24 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

PIHAK PERTAMA,

DOMINIKUS MALI, S.Sos

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

A. SASARAN STRATEGIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE	SPBE	2,3

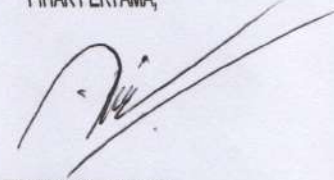
B PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	410.920.000	PAD+PBHP
	TOTAL :	Rp.	410.920.000	

ATAMBUA, 24 JANUARI 2024


PIHAK KEDUA,

FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

PIHAK PERTAMA,

DOMINIKUS MALI, S.Sos



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YASINTHA MUTIK LOES, SE

Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Statistik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu

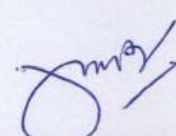
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

Atambua, 24 Januari 2024

PIHAK PERTEMA,

YASINTHA MUTIK LOES, SE

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELU**

A SASARAN STRATEGIS

No.	Sasaran / Tugas Pokok	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (SPBE)	Meningkatnya Pengamanan Persandian dan Statistik	60,00 (%)
2	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi (SPBE)	Meningkatnya Pengamanan Persandian dan Statistik	61,76 (%)

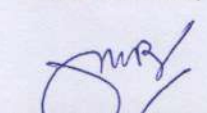
B PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	-
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	-
	TOTAL :	Rp.	-


PIHAK KEDUA,

FREDRIKUS L. BERE MAU, ST

ATAMBUA, 24 JANUARI 2024

PIHAK PERTAMA,

YASINTHA MUTIK LOES, SE

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Bidang Urusan/ SKPD/ PROGRAM/ Kegiatan/ Sun Kegiatan Misi RPJMD	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif		Lokasi	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah Dana		Sumber Dana
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											2.668.531.712		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								2.232.611.712		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	100%				100%		2.232.611.712		
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%				100%	-		
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera		-	APBD II	Atambua
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				100%	1.965.031.712		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.906.981.712	APBD II	Atambua
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		58.050.000	APBD II	Atambua
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%				100%	75.698.000		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang Disediakan	4 Jenis	Peningkatan Layanan Masyarakat dan Kinerja Aparatur		-	APBD II	Atambua

Kode					Bidang Urusan/ SKPD/ PROGRAM/ Kegiatan/Sub Kegiatan Misi RPJMD	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif		Lokasi
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah Dana	Sumber Dana	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah		13.100.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah		8.378.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	Lancarnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	APBD II	Kab. Belu
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah		9.000.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah		45.220.000	APBD II	Provinsi dan Luar Provinsi
2	16	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				100%	91.882.000		
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	Lancarnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91.882.000	APBD II	Kab. Belu

Kode					Bidang Urusan/ SKPD/ PROGRAM/ Kegiatan/Sub Kegiatan Misi RPJMD	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif		Lokasi
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah Dana	Sumber Dana	
2	16	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100%	100.000.000		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur		100.000.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	02	2.01	-	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	435.920.000		
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media			Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	10 Layanan	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota		260.920.000	APBD II	Kab. Belu
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Jumlah Kegiatan Studi Banding Yang Diadakan	81 KIM	Lancarnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota		175.000.000	APBD II	Kab. Belu

Atambua, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Belu



FRDRIKUS L. BERE MAU, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19760928 200112 1 00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Formula Indikator	Metodologi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE	1. Indeks SPBE	2,3	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Data Kinerja dikumpulkan melalui kegiatan Pembentukan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Belu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu

Atambua, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Belu



FRDRIKUS L. BERE MAU, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19760928 200112 1 00